

PERBAIKAN DPS DI TEMANGGUNG
PPS-PPK Pleno Rekapitulasi



KR-Istimewa

Pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi DPS di Temanggung.

TEMANGGUNG (KR) - Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Temanggung menggelar rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) secara serentak, Senin (8/5).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Temanggung Muhammad Yusuf Hasyim mengatakan rapat pleno ini sesuai jadwal digelar serentak di masing-masing desa dan kelurahan. "Ada 867 PPS di Temanggung yang hari ini rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPS," jelasnya.

Dalam rapat pleno tersebut diundang antara lain Pengawas Kelurahan/Desa, parpol peserta pemilu di tingkat desa, pemerintah desa, Polri dan TNI, serta tokoh masyarakat.

Para tamu undangan dimintai masukan terkait DPS yang telah diumumkan dan berbagai permasalahan terkait daftar pemilih. "Selain itu, tamu undangan juga ikut berpartisipasi dalam menyampaikan informasi DPS hasil perbaikan, yang ditetapkan di tingkat kelurahan/desa," ungkap Yusuf Hasyim.

Sementara itu, rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat kecamatan digelar Rabu (10/5) secara serentak di 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Temanggung. Dijadwalkan, KPU menggelar rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPS tingkat kabupaten, Jumat 12 Mei.

"Dalam rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPS ditetapkan jumlah pemilih aktif, pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat, perbaikan data pemilih, dan pemilih potensial non-KTP. Karena itu, dipastikan ada perubahan data jumlah pemilih aktif di Kabupaten Temanggung," tandas Yusuf. **(Osy)-f**

BUPATI SUKOHARJO CEK JALAN RUSAK
Perbaikan Dipastikan Sesuai Jadwal

SUKOHARJO (KR) - Bupati Sukoharjo Etik Suryani memastikan pengerjaan jalan sesuai dengan jadwal dan perencanaan. Sebelumnya, perbaikan jalan rusak juga sudah dikerjakan Pemkab Sukoharjo. Etik Suryani mengungkapkan hal ini setelah melakukan pengecekan langsung sejumlah lokasi perbaikan jalan.

Masyarakat diminta bersabar karena proses perbaikan jalan membutuhkan proses, salah satunya harus melalui lelang.

"Pengerjaan dilakukan sesuai jadwal dan perencanaan. Hal itu juga sesuai laporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sukoharjo," tandas bupati, Selasa (9/5). Lokasi yang dicek langsung bupati di antaranya ruas jalan

Bekonang-Mojo di Kecamatan Mojolaban.

Perbaikan jalan rusak menggunakan alat berat dan sistem pengaspalan ulang hotmix. Pengecekan langsung dilakukan oleh Etik Suryani, karena sebelumnya muncul keluhan jalan rusak dari masyarakat.

Bupati menegaskan, sebelum keluhan masyarakat muncul, sebenarnya Pemkab Sukoharjo sudah memiliki program perbaikan dan menyiapkan anggaran untuk perbaikan jalan.

Namun perbaikan membutuhkan proses cukup lama. Selain lelang, proses perbaikan jalan sempat tertunda cukup lama karena faktor cuaca dan arus balik maupun arus mudik lebaran. "Setelah lelang selesai, langsung dilakukan perbaikan jalan," tandasnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sukoharjo, Bowo Sutopo Dwi Atmojo, menambahkan bahwa pihaknya tetap fokus pada pelaksanaan pembangunan proyek strategis daerah tahun 2023, termasuk pengerjaan infrastruktur penting lainnya.

Tahapan telah dikerjakan dan sebagian besar telah selesai lelang. Namun pengerjaan baru akan dilaksanakan setelah arus mudik dan balik Lebaran 2023 benar-benar selesai.

Menurut Bowo, persiapan perbaikan infrastruktur sudah dilakukan, tinggal pelaksanaan saja. Ada sekitar 11 titik jalan jadi prioritas usai lebaran ini.

Proyek yang akan dikerjakan Pemkab Sukoharjo di antaranya peningkatan ja-

lan Telukan-Cuplik, peningkatan jalan Pajang-Parangtejo, peningkatan jalan Adi Sumarmo.

Selain itu, lanjut Bowo, peningkatan jalan Weru-Tegalsari, peningkatan jalan Tengklík-Jarum, pemeliharaan berkala jalan Sidan-

Kayuapak, peningkatan jalan Mulur-Sidan, pemeliharaan berkala jalan Bekonang-Mojo, pemeliharaan berkala jalan Bekonang-Sidan, pemeliharaan berkala jalan Gentan-Bekonang, dan pelebaran jalan Wirun-Palur. **(Mam)-f**



KR-Dok Pemkab Sukoharjo

Bupati Sukoharjo Etik Suryani melakukan cek langsung perbaikan jalan Bekonang-Mojo di Mojolaban.

7 PARPOL KOORDINASI DI KPU KARANGANYAR
PKS Pendaftar Perdana Bacaleg

KARANGANYAR (KR) - Tujuh parpol sudah berkoordinasi dengan KPU Karanganyar terkait pendaftaran bakal calon anggota legislatif (bacaleg) Pemilu 2024. Tersisa 11 parpol yang kemungkinan menyusul di hari-hari terakhir menjelang penutupan pendaftaran pada 14 Mei 2023.

Dijadwalkan pendaftaran calon anggota DPRD Karanganyar dari tujuh parpol tersebut pada 9-12 Mei 2023. "Sebenarnya KPU membuka pendaftaran mulai 1 Mei 2023. Namun yang mengonfirmasi mendaftar dan minta jadwalnya baru tujuh parpol. Diawali PKS sebagai pendaftar perdana pada hari ini," kata Ketua KPU Karanganyar Triastuti Suryandari kepada wartawan di kantornya, Selasa (10/5).

Dalam pendaftaran bacaleg, ketua dan sekretaris parpol wajib hadir membersamai calon atau diwakilkan dengan surat kuasa. Dokumen yang diserahkan berupa formulir pengajuan pencalonan yang ditandatangani ketua dan sekretaris parpol bercap basah. Kemudian persetujuan dari DPP parpol. "Jumlah bakal calon boleh setara total jumlah kursi anggota DPRD yang mewakili lima daerah pemilihan. Di Karanganyar, terdapat 45 kursi yang diperebutkan di Pemilu 2024," jelas Triastuti.

Komisioner KPU Karanganyar, M Maksim menyatakan pihaknya telah menyiapkan empat desk pelayanan pendaftaran. Ia mengantisipasi jika terdapat lebih dari satu parpol mendaftarkan bacaleg

secara bersamaan. "Ada 18 parpol di Karanganyar. Kami menyiapkan empat desk agar bisa melayani pendaftaran secara maksimal, jika mereka berbondong-bondong datang di hari-hari terakhir sebelum penutupan," ungkapnya.

Tahapan verifikasi administrasi berkas calon dijadwalkan sampai Juni. Masih terdapat waktu perbaikan setelah itu. Maksim juga mengimbau bakal calon yang masih menjabat secara definitif dalam jabatan tertentu supaya mengundurkan diri, dengan dibuktikan SK yang diserahkan saat pendaftaran atau mengunggahnya di sipol, maksimal 3 Oktober 2023.

"Jika setelah 3 Oktober belum juga menyerahkan SK tersebut, risikonya parpol tidak bisa lagi

mengganti dengan calon lain," jelas Maksim.

Bagi bakal calon yang pernah menjalani vonis penjara dengan ancaman 5 tahun, lanjut Maksim, harus mengemukakan putusan hakim ke publik. Yang bersangkutan juga sudah menjalani kebebasannya selama lima tahun sebelum mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPRD ke KPU. "Kalau ancaman penjara kurang dari lima tahun, misalnya hanya dua tahun, tidak terkena aturan tersebut," tambah.

Maksim menyebutkan, jadwal tujuh parpol yang sudah koordinasi dan konfirmasi ke KPU Karanganyar juga masih berubah-ubah. Golkar dan Demokrat, sedianya mendaftar Rabu (10/5) namun diundur. **(Lim)-f**

HUKUM

PERMOHONAN CONSTATERING DI REJOWINANGUN
Termohon Tidak Bisa Tunjukkan Lokasi yang Benar



KR-Istimewa

Herkus Wijayadi dan staf.

YOGYA (KR) - Kuasa Hukum pemohon Constatering/Eksekusi menegaskan hasil constatering Rabu (3/5) lalu di lokasi tanah obyek sengketa di wilayah Kelurahan Rejowinangun Kotagede sudah benar dan cocok. Sehingga bisa segera dijadwalkan eksekusi yang akan ditentukan PN Yogya dan diharapkan bisa dilakukan secepatnya.

"Meski kuasa hukum termohon menyatakan salah sasaran (KR, Sabtu (8/5), namun dia tidak mampu menunjukkan obyek lain yang dianggap benar. Sehingga secara stiljzwegen atau diam berarti setuju maka dianggap termohon eksekusi sudah menyetujui tidak ada obyek lain selain obyek yang diconstatering oleh PN Yogya kemarin," tegas Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi, R Herkus Wijayadi SH kepada KR Selasa (9/5).

Herkus menjelaskan maksud dan tujuan constatering adalah untuk pencocokan data kebenaran obyek yang akan dieksekusi apakah benar sesuai data formal dan fisik atau tidak.

"Ternyata setelah dilakukan constatering di TKP obyek sudah sesuai data Warkah BPN dan lokasi sudah tepat sesuai keterangan aparat RT/RW maupun kelurahan setempat obyek berada. Sehingga antara data formal BPN dengan fisik adalah sama," tegasnya.

Bahkan pihak perwakilan dari termohon eksekusi, lanjut Herkus, juga menerangkan bahwa benar itu obyek miliknya yang dimohonkan eksekusi oleh pihak Pemohon. "Terkait salah ketik dalam surat ukur tidak serta merta menjadikan salah obyek karena secara hukum harus dilihat apakah benar no SHM nya dan sekaligus dapat dicocokkan kebenaran NIB (Nomor Induk Bidang) nya," jelasnya.

Sehingga secara hukum kalau SHM dan NIB sama lokasi fisik sudah dijelaskan saksi-saksi di lapangan, lanjut Herkus terkait andai ada salah ketik data penetapan tidak berarti salah obyek. "Dalam perkara ini obyek sudah tepat dan benar karena tidak ada lokasi lain dan dalam sertipikat hanya menyebut lokasi di Kelurahan Rejowinangun Kotagede, bisa terjadi dalam mengetik undangan panitera salah ketik dan bukan kesalahan krusial," tegasnya.

Lebih lanjut Herkus juga menyayangkan sikap dari kuasa hukum termohon constatering yang secara tidak elegan menyerang pribadi kuasa hukum pemohon dengan kata-kata kurang sopan dan tidak profesional di hadapan umum saat pelaksanaan constatering.

"Kita seharusnya sebagai rekan sejawat bekerja secara profesional jangan menyerang pribadi kami sebagai sesama profesi lawyer," harapnya. **(Vin)-f**

Diduga Korupsi DD, Kades Jejeg Jadi Tersangka

SLAWI (KR) - Diduga melakukan korupsi dana desa (DD) sebesar Rp 1,2 miliar, Kades Jejeg Kabupaten Tegal, Mar (50), resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sementara guna mendapatkan data riil kerugian negara, akibat ulah oknum kades itu, pihak Kejari setempat menjalin kerja sama dengan pihak akademisi Universitas Panca Sakti (UPS) Tegal.

Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tegal, bersama Inspektorat melakukan tinjauan pengerjaan fisik yang dilakukan Kades Jejeg, Kecamatan Bumijawa itu.

Kasi Intel merangkap Humas Kejari Kabupaten Tegal, Yusuf Luqita Danawiharja SH MH, mengatakan permintaan pendampingan ahli dari

akademisi itu akan dilakukan bersama UPS Tegal.

"Dengan pendampingan ahli dari akademisi, dalam hal ini UPS, akan mempermudah jumlah kerugian negara terkait mangkraknya pengerjaan fisik yang didanai keuangan negara di Desa Jejeg. Itu harus melibatkan ahli kontruksi dari akademisi," ujar Yusuf, Rabu (10/5).

Ketika ditanya, Yusuf mengaku, bila menggandeng OPD dalam hal ini DPUPR ahli kontruksi belum mengantongi sertifikat ahli. "Akhirnya kami menggandeng akademisi untuk langsung melakukan auditor bersama pihak Inspektorat. Ini sebagai langkah lanjutan paska Jaksa penyidik melakukan tinjauan ke lokasi Desa Jejeg khususnya pemba-

ngunan yang sempat dilaksanakan maupun yang tidak dilaksanakan," tegasnya.

Menurut Yusuf, taksiran awal kerugian negara akibat penyimpangan penggunaan DD oleh Kades Jejeg itu mencapai kisaran Rp 1,2 miliar selama 2 tahun anggaran 2021 dan 2022. Di mana di tahun 2021, penyimpangan penggunaan DD mencapai Rp 700 juta dan berlanjut di tahun 2022 sebesar Rp 500 juta.

Yusuf menyebutkan, ada beberapa kegiatan fisik yang diduga fiktif yang dilakukan oleh Kades Jejeg. Proses penghitungan kerugian negara bakal dilakukan secara cermat melalui proses audit, agar kita dapat data yang akurat," tambah Yusuf. **(Ryd)-f**

Pamer 'Anu-nya', Penjaga Toilet Diringkus

YOGYA (KR) - Seorang kakek penjaga toilet umum, AS (62) warga Gondomanan Yogyakarta, diamankan petugas Polresta Yogyakarta. Aksi di toilet umum Alun-alun Selatan Patihan Kraton Yogya, sangant meresahkan.

"Aksinya Senin (20/4) sekitar pukul 20.40, membuat ketakutan dua korban NW (39) warga Kraton Yogya dan AW (29) warga Sewon Bantul yang kemudian melapor ke polisi," tutur Kanit PPA Sat Reskrim Polresta Yogyakarta, Ipda Apri Sawitri.

Awalnya korban NW dan AW pergi ke toilet umum Alun-alun Selatan. Keduanya yang tidak saling kenal, kemudian berjalan beriringan masuk ke dalam toilet yang di lantai bawah.

"Setelah selesai, saat menuju meja pembayaran, ada tersangka dalam posisi duduk di kursi kedua tangan di atas meja, badan tegak dengan posisi kedua kaki tersangka

terbuka. Kedua korban kaget karena tersangka mengeluarkan 'anu-nya' untuk diperlihatkan kepada korban," jelasnya.

Korban NW secara tidak sengaja merekam kejadian tersebut dan dengan bukti itu kedua korban sepakat untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

porkan kejadian tersebut ke Polresta Yogyakarta yang bergerak cepat dan meringkus korban serta memeriksa saksi-saksi Selasa (21/3) dini hari.

"Tersangka mengaku puas setelah memperlihatkan 'anu-nya' terhadap perempuan. Tersangka ini bekerja sebagai penjaga toilet umum baru 3 bulan," ucapnya.

Tersangka dijerat Pidana Pasal 36 UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi atau Pasal 281 KUHP Bunyi Pasal 36 UU Nor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi hukuman 10 tahun kurungan penjara. **(Vin)-f**



KR-Juvinlarto

Tersangka pornografi dihadirkan dalam rilis.